

TUGAS AKHIR

PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AGGRESSIVENESS* DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan oleh :

Muh. Zulkifli (016 04 009)

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
MAKASSAR
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AGGRESSIVENESS* DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA


Oleh:

MUH. ZULKIFLI (016 04 009)

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1



(Sri Nirmala Sari, S.E., M.Si.)

Pembimbing 2



(Mahardian Harsanti P, S.ST)

Mengetahui,

Ka. Prodi

24/9/19

(Nurul Afifah, S.E, M.Ak.)

Direktur


(Drs. H. Djudil Akrim, M.M.)

Pernyataan Bukan Plagiat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Zulkifli NIM: 01604009

Dengan judul :
Pengaruh Koneksi Politik dan *Leverage* terhadap *Tax Aggressiveness*
di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, Agustus 2019

Nama Mahasiswa

Muh. Zulkifli

Tanda Tangan
INSTRUMEN
TERATA
TEMPEL
0160AFF9866227
6000
RIBU-RIBU
Muh. Zulkifli



ABSTRAK

Muh. Zulkifli , Pengaruh Koneksi Politik dan *Leverage* terhadap *Tax Aggressiveness* di Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia (Dibimbing oleh Sri Nirmala sari dan Mahardian Hersanti)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Koneksi Politik dan *Leverage* terhadap *Tax Aggressiveness* di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan sampel berupa laporan keuangan dari 14 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Data dianalisis dengan menggunakan software SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*. Kedekatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pemerintah membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan atau keputusan apapun agar tetap mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh. Perusahaan yang patuh seringkali mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah sehingga akan meningkatkan citra perusahaan tersebut. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk selalu mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan Variabel *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*, Perusahaan memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak bahkan akan cenderung mengarah kepada tindakan penghindaran pajak. Semakin besar jumlah *Leverage* maka akan semakin besar pula tindakan penghindaran pajak dari adanya beban bunga yang ditimbulkan dari utang tersebut.

Kata Kunci: koneksi politik, *Leverage* dan *Tax Aggressiveness*

ABSTRACT

Muh. Zulkifli, The Effect of Political Connections and Leverage on Tax Aggressiveness in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (Supervised by Sri Nirmala Sari and Mahardian Hersanti)

This study aims to determine the effect of Political Connections and Leverage on Tax Aggressiveness in Manufacturing Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2016-2018 period. The data used are secondary data and samples in the form of financial statements from 14 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. Data were analyzed using SPSS software version 20. The results of this study indicate that the political connection variable has no effect on Tax Aggressiveness. The closeness that is owned by the company with the government makes the company more careful in taking any policy or decision to keep getting an award from the government as a compliant taxpayer. Compliant companies often get various awards from the government so that it will improve the company's image. This also encourages companies to always follow various regulations issued by the government . And the Leverage Variable has a positive effect on Tax Aggressiveness, the company utilizing debt to minimize tax burden will even tend to lead to tax avoidance. The greater the amount of leverage, the greater the tax avoidance action from the interest expense arising from the debt.

Keywords: political connections, leverage and tax aggressiveness

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Pengaruh Koneksi Politik dan *Leverage* terhadap *Tax Aggressiveness* di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”** ini dengan baik. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Politeknik Bosowa. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir jaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Ibunda Faridah, S.Pd. dan Ayahanda Ansar SM yang telah mencurahkan kasih sayang dengan segenap hati tanpa tuntutan serta selalu memberikan dorongan baik moril maupun materil dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas doanya.
2. Bapak Drs. H. Djudil Akrim, M.M selaku direktur Politeknik Bosowa, yang telah memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Ibu Nurul Afifah, S.E., M.Ak. selaku Kepala Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa, yang telah memberikan semangat positifnya serta memberikan masukan dan arahan yang memiliki kontribusi besar dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Ibu Sri Nirmala Sari, S.E., M.Si. selaku pembimbing I, yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama penulisan tugas

akhir ini serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis.

5. Ibu Mahardian Hersanti P, S.St selaku pembimbing II, yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama penulisan tugas akhir ini serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis.
6. Bapak Imron Burhan, S.Pd., M.Pd. selaku wali kelas Perpajakan 4 atas bimbingan dan dukungan selama 3 tahun masa perkuliahan.
7. Segenap dosen Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu bagi penulis selama masa perkuliahan.
8. Teman-teman Program Studi Perpajakan angkatan 2016 untuk segala bantuan, tawa dan kebersamaan selama 3 tahun masa perkuliahan.
9. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Tugas akhir ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di laporan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Err
or! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Batasan Masalah	4
4. Tujuan Penelitian	4
5. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
1. <i>Roadmap</i> Penelitian	5
2. Teori Dasar	7
a. Teori Keagenan	7
b. Tax Aggressiveness	8
c. Perbedaan antara Tax Aggressiveness dan Tax Evasion	9
d. Koneksi Politik	9
e. Leverage	11
f. Pengembangan Hipotesis	13
g. Kerangka Pemikiran	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	15
1. Waktu dan Lokasi Penelitian	15

2. Diagram Alir Penelitian.....	15
3. Operasionalisasi Variabel.....	16
4. Jenis dan Sumber Data.....	18
5. Prosedur Pengambilan Data/Sampel.....	19
6. Teknik Analisis Data.....	19
BAB IV PEMBAHASAN.....	23
1. Profil Perusahaan.....	23
a. Sejarah.....	23
b. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia.....	26
c. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia.....	27
d. Jajaran Direksi.....	27
2. Pengolahan Data.....	31
a. Sampel Penelitian	31
3. Analisis Data.....	32
a. Hasil Uji Statistik Deskriptif	32
b. Hasil Uji Asumsi Klasik	34
c. Hasil Uji Hipotesis	37
4. Pembahasan.....	39
a. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Aggressiveness.....	39
b. Pengaruh Leverage terhadap Tax Aggressiveness.....	40
BAB V PENUTUP	43
1. Kesimpulan.....	43
2. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Roadmap</i> Penelitian	5
Gambar 3.1	Diagram Alir Penelitian	13
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Kriteria Sampel Pada Penelitian	31
Tabel 4.2	Uji Statistik Deskriptif	32
Tabel 4.3	Uji Normalitas	34
Tabel 4.4	Uji Heteroskedasitas	35
Tabel 4.5	Uji Multikolinieritas	36
Tabel 4.6	Uji Autokorelasi	37
Tabel 4.7	Uji Analisis Regresi Berganda	38
Tabel 4.8	Uji T	39
Tabel 4.9	Uji Determinasi R^2	40

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, yaitu 1.618,1 triliun rupiah (85,4 persen) dari total pendapatan negara 1.894,7 triliun rupiah dalam APBN 2018. Salah satu permasalahan yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak yang optimal adalah *Tax Aggressiveness*. [1] Pemungutan pajak merupakan hal yang tidak mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan perpajakan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajak sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. [2]

Tax Aggressiveness adalah suatu aktivitas perencanaan pajak (*tax planning*) untuk menurunkan laba kena pajak. *Tax Aggressiveness* mengarah bagaimana usaha perusahaan dapat membayar pajak serendah-rendahnya secara legal dan aman tanpa harus melanggar ketentuan perpajakan. [2]

Perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan pemerintah. Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau

mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Perusahaan yang memiliki koneksi politik biasanya terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dan resiko pemeriksaan pajak rendah. Sehingga perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak karena tingkat pemeriksaan pajaknya rendah. [3] Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chansog dan Liandong pada tahun 2014 dengan judul *Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness* dengan hasil Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*. Hasil Penelitiannya konsisten dengan dugaan perusahaan yang terhubung secara politis lebih cenderung melakukan *Tax Aggressiveness* karena biaya yang lebih rendah dari yang diharapkan penegakan pajak, informasi yang lebih baik tentang hukum pajak dan perubahan penegakan hukum dan modal yang lebih rendah tekanan pasar untuk transparansi.[5]

Leverage pada perusahaan adalah tingkat dukungan modal perusahaan yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Semakin besar tingkat modal perusahaan maka akan semakin tinggi resiko yang akan dihadapi perusahaan seperti kebangkrutan dan biaya keagenan yang tinggi. Berdasarkan teori agensi, kontrak efisien dalam hubungan keagenan tidak dapat terjadi apabila kepentingan prinsipal dan agen yang bertentangan, diperlukan pengawasan dari pihak luar perusahaan untuk mengawasi pihak agen. [4]

Pengawasan tersebut dapat mempengaruhi sikap agen perusahaan, karena semakin banyak pengawasan dalam perusahaan maka agen akan lebih berhati-hati untuk setiap keputusan yang ditetapkan. Namun dengan adanya utang jangka panjang atau *Leverage* pada perusahaan akan menimbulkan beban tetap yaitu adanya bunga yang harus dibayar. Bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*)

dengan penghasilan kena pajak sehingga akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Berkurangnya laba kena pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Semakin tinggi *Leverage* semakin besar pula utang yang ditanggung perusahaan sehingga penghindaran pajak akan semakin tinggi. [4] Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Marfu'ah pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh *Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance* dengan hasil *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika Nilai *Leverage* semakin tinggi maka semakin tinggi juga tindakan *Tax Aggressiveness*. [6]

Perusahaan manufaktur adalah jenis perusahaan yang melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi hingga proses menjual kembali, sehingga dalam segala aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. [1]

Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Perusahaan manufaktur juga memiliki saham yang tahan terhadap krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar produk manufaktur tetap dibutuhkan, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk rugi. [1]

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengajukan penelitian sebagai Tugas Akhir dengan judul **“PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AGGRESSIVENESS DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”**

2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh koneksi politik terhadap *Tax Aggressiveness* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- b. Bagaimana Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Aggressiveness* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam, penulis membatasi masalah hanya meliputi Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan (*Annual Report*) dari Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik dan *Leverage* terhadap *Tax Aggressiveness* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

a. Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bidang ilmu perpajakan khususnya mengenai *Tax Aggressiveness*.

b. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan atau rekomendasi bagi praktisi yang menjalankan usaha terutama yang berhubungan dengan objek penelitian dan sebagai bahan acuan pada penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Roadmap* Penelitian

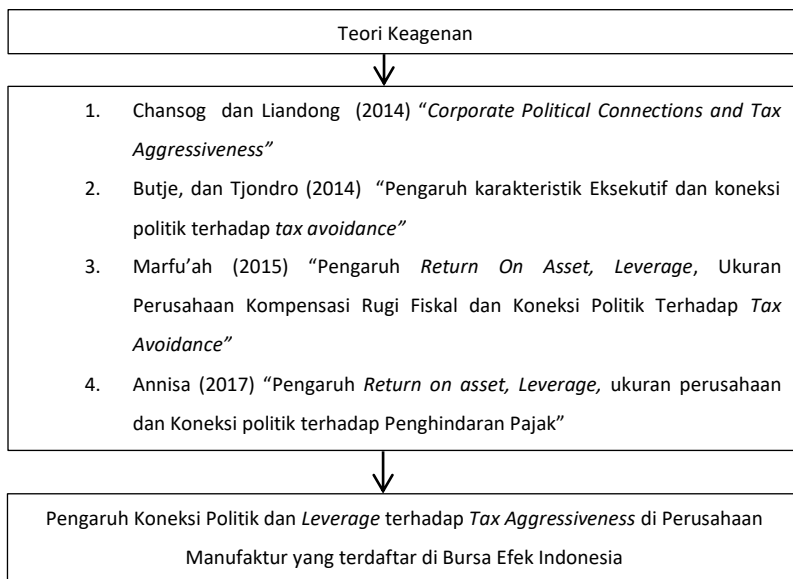
Chansog dan Liandong (2014) melakukan penelitian tentang *Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness*. Metode analisa data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Koneksi Politik Berpengaruh Positif terhadap *Tax Aggressiveness*, Hasil ini konsisten dengan dugaan perusahaan yang terhubung secara politis lebih cenderung melakukan *Tax Aggressiveness* karena biaya yang lebih rendah dari yang diharapkan penegakan pajak, informasi yang lebih baik tentang hukum pajak dan perubahan penegakan hukum dan modal yang lebih rendah tekanan pasar untuk transparansi. [5]

Butje dan Tjondro (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh karakteristik Eksekutif dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan Metode analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap CETR sehingga perusahaan melakukan *tax avoidance*. [3]

Marfu'ah (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*, dengan tujuan untuk mengetahui bahwa *Return on Assets (ROA), Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik* mempengaruhi *tax avoidance*. Metode analisa data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sebelum menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap

terhadap tax avoidance. Semakin tinggi koneksi politik tidak mempengaruhi suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* dan *Leverage* berpengaruh positif terhadap tax avoidance. [6]

Annisa (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Return on asset*, *Leverage*, ukuran perusahaan dan Koneksi politik terhadap Penghindaran Pajak, dengan tujuan untuk mengetahui segala keterbatasan yang terjadi terkait dengan *Return on asset*, *Leverage*, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap Penghindaran Pajak. Metode analisa data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dan *Leverage* yang diprosikan dengan *Debt Ratio* (DR) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan. [7]



Gambar 2.1. Roadmap Penelitian

2. Teori Dasar

a. *Teori Keagenan*

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah “suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agent untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent”. Baik maupun agent diasumsikan orang ekonomi rasional dan semata – mata termotivasi oleh kepentingan pribadi. mendelegasikan pembuatan keputusan mengenai perusahaan kepada manajer atau agent. Bagaimanapun juga, manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Tujuan utama dari teori keagenan (*agency theory*) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak – pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisasi biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. [8]

Teori keagenan adalah model yang dipergunakan untuk merumuskan permasalahan yang muncul antara pemegang saham dan manajemen pada suatu perusahaan. Pada teori keagenan yang disebut prinsipal adalah pemegang saham dan agen adalah manajemen pengelola perusahaan. Manajemen wajib melaporkan setiap hasil kinerja kepada principal melalui laporan keuangan. Pendelegasian wewenang kepada agent akan menyebabkan manajemen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan prinsipal. Prinsipal akan lebih memonitor segala tindakan yang diambil oleh manajemen agar manajemen tidak mengambil tindakan yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi. Adanya hubungan tersebut terkadang akan menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang yaitu mereka berusaha untuk mewujudkan kepentingan masing-masing. [8]

Pemegang saham tentunya ingin mendapatkan keuntungan yang besar atas investasinya di perusahaan. Hal ini memaksa

manajemen agar dapat selalu memberikan kinerja yang baik dan menghasilkan keuntungan yang besar. Tekanan untuk selalu memberikan keuntungan yang besar membuat manajemen melakukan berbagai cara termasuk dengan berusaha agar besarnya pajak yang dibayar rendah. Tindakan itulah yang mengarah kepada penghindaran pajak (*Tax Aggressiveness*).

b. *Tax Aggressiveness*

Menurut Frank Lynch dan Rego (2009) dalam bukunya yang berjudul "*The Accounting Review*" pada bab *Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting* halaman 467-496 . *Tax Aggressiveness* adalah suatu tindakan yang ditunjukkan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*). [8]

Pada hasil penelitian Hanlon Dyreng dan Maydew (2009) yang berjudul "*Long Run Corporate Tax Avoidance*" Penghindaran pajak dihitung menggunakan CETR karena CETR tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi. Metode ini juga diterima dalam literature akuntansi. Semakin tinggi nilai CETR maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah. [9]

Tax Aggressiveness merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak (Dyreng, 2008). Praktek *Tax Aggressiveness* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Chen (2010) menyatakan bahwa penggunaan istilah *Tax Aggressiveness* dapat digunakan bergantian dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*). [9]

Pada dasarnya, wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Hal inilah yang membuat wajib pajak melakukan penghindaran pajak, baik bersifat legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance* atau

Tax Aggressiveness, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*).

c. Perbedaan antara *Tax Aggressiveness* dan *Tax Evasion*

Dari definisi antara *tax Aggressiveness* dengan *tax evasion*, jelas keduanya memiliki perbedaan dalam hal legalitasnya. Artinya *tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan cara-cara yang diperkenankan secara hukum.

Jadi, dari sudut pandang hukum, *tax aggressiveness* merupakan tindakan legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sebagaimana diketahui, peraturan perundang-undangan tentang perpajakan merupakan produk hukum. Tak semua produk hukum sempurna, masih ada *grey area* atau bagian abu-abu yang sering kali menjadi titik lemah dari peraturan perundang-undangan tersebut. Jika jeli, maka wajib pajak dapat menemukan titik lemah tersebut dan memanfaatkannya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya.

Lain halnya dengan *tax evasion*, karena upaya penghindaran pajak lebih mengarah pada penggelapan pajak yang dari sisi legalitasnya dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Upaya penghindaran pajak pada *tax evasion* dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum perpajakan yang berlaku. Di sini wajib pajak sudah memiliki niat untuk tidak membayar pajak. [1]

d. Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan anantara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan dengan cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. [10]

Koneksi politik dipercaya sebagai sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan. Perusahaan yang melakukan koneksi politik adalah perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak pemerintah. Hubungan istimewa terhadap pihak pemerintah bisa diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, bisa dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). [11]

Perusahaan di anggap memiliki koneksi politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik [12]. Hubungan dekat yang dimiliki perusahaan berkoneksi politik yang dimaksud meliputi [12]:

- 1) Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama memiliki hubungan pertemanan dengan kepala negara, menteri atau anggota parlemen.
- 2) Koneksi dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala negara atau perdana menteri pada periode sebelumnya.
- 3) Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama terlibat secara langsung kedalam dunia politik.

Koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan *Tax Aggressiveness* dengan cara memanfaatkan hubungan khusus dengan pemerintah, terlebih bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang memegang posisi penting didalam pemerintahan dalam mengungkapkan kewajiban pajaknya untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan sedikit sehingga laba perusahaan lebih maksimal. Perusahaan dengan koneksi politik mampu melakukan *tax planning* yang lebih agresif karena adanya

perlindungan dari pemerintah yang berdampak pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Keuntungan lain yang di dapat oleh perusahaan yang berkoneksi politik adalah akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah dan kekuatan pasar yang lebih kuat. [12]

Koneksi politik dapat memberikan dampak pada dua sisi bagi nilai perusahaan. Hal tersebut dapat meningkatkan atau justru membahayakan nilai perusahaan, melaporkan hasil penelitian bahwa perusahaan yang memiliki CEO berkoneksi politik memiliki kinerja lebih rendah sekitar 37% dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik apabila diukur dengan *stock return* perusahaan mereka tiga tahun pasca IPO.

Keuntungan lain yang di dapat oleh perusahaan yang berkoneksi politik adalah akses yang lebih mudah untuk pembiayaan hutang, pajak yang lebih rendah, dan kekuatan pasar yang lebih kuat. Zhang, *et. al.*, (2010) memberikan contoh dari hasil laporan penelitiannya bahwa bankir sering dipaksa untuk memberikan pinjaman bagi proyek-proyek yang dilakukan oleh perusahaan yang berkoneksi politik meskipun proyek tersebut diperkirakan tidak menguntungkan. [5]

e. Leverage

Leverage adalah penggunaan hutang untuk membiayai investasi. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan. *Leverage* menunjukkan seberapa besar perusahaan memiliki utang jangka panjang maupun pendek dibandingkan dengan total aset yang dimiliki untuk kegiatan pendanaan. Apabila perusahaan ingin meningkatkan nilai perusahaan melalui *earning per share*, maka pembiayaan investasi tambahan harus dibiayai oleh hutang guna penghematan pajak sekaligus mempertahankan jumlah saham beredar dari perusahaan. Pembiayaan dengan hutang maksimum akan mendapatkan penghematan pajak perusahaan yang optimal.

Semakin tinggi *Leverage* semakin besar pula hutang yang ditanggung perusahaan sehingga penghindaran pajak akan semakin rendah. [7]

Leverage pada perusahaan ada dua macam, yaitu *operating leverage* dan *financial Leverage* (Martono dan Harjito, 2010). *Operating Leverage* didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya operasi tetap untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap *earning before interest and taxes* (EBIT). *Financial Leverage* merupakan proksi yang digunakan untuk menangkap keputusan pendanaan perusahaan. [13]

Financial Leverage diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Selain itu DER juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Jika rasio ini semakin besar, maka dapat dijelaskan bahwa struktur modal yang paling besar berasal dari komposisi hutang. [4]

Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. [7]

f. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Aggressiveness*

Perusahaan berkoneksi politik akan memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah. Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak yang rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menetapkan *tax planning* yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Sependapat dengan Kim dan Zhang (2014) menyatakan dampak positif dari perusahaan memiliki koneksi politik yaitu mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah dalam hal perpajakan seperti menghindari audit pajak. Perusahaan tidak takut untuk melakukan perencanaan pajak di karenakan pemeriksaan pajak yang rendah. Hubungan politik yang dimiliki perusahaan mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan konsekuensi negative yang ada. [5]

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan koneksi politik dengan *Tax Aggressiveness*. Penelitian yang dilakukan Kim dan Zhang (2014) menghubungkan pengaruh koneksi politik terhadap tindakan pajak agresif menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik lebih memiliki agresivitas pajak dibanding perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik [5]. Menurut Butje dan Tjondo (2014), koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak [3]. Sementara Marfu'ah (2015) menyimpulkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [6]. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Koneksi Politik Memiliki Pengaruh Terhadap *Tax Aggressiveness*

b. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Aggressiveness*

Perusahaan yang memiliki utang relatif besar mempunyai *cash effective tax rate* (CETR) rendah karena adanya pembayaran beban bunga akan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan.

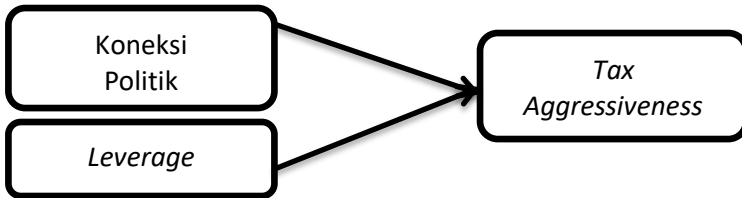
Perusahaan yang nilai utangnya relative besar akan menyebabkan semakin tingginya pembayaran bunga maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah. [14]

Tingginya utang maka tingkat ketergantungan pada pihak ketiga juga semakin tinggi. Jika kewajiban pajak yang dimiliki perusahaan tinggi maka kebijakan yang dapat diambil oleh perusahaan adalah menambah utang yang berakibat pada berkurangnya beban pajak sehingga menimbulkan indikasi bahwa perusahaan agresif terhadap pajak yang ditunjukkan dengan nilai *cash effective tax rate* yang rendah. [15]

H2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*

g. *Kerangka Pemikiran*

Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.2. Kerangka Penelitian

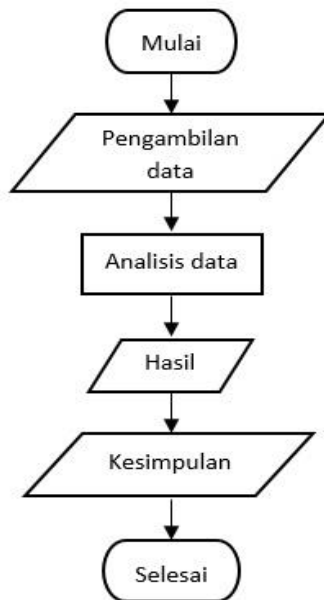
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2019. Penelitian dilakukan pada Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Makassar.

2. Diagram Alir Penelitian



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Penjelasan dari Gambar III.1 yaitu :

- a. Pengambilan data, yaitu penulis mengambil data berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
- b. Analisis data, yaitu penulis melakukan analisa terhadap data penelitian dengan menggunakan teknik analisa deskriptif dan teknik analisis linier berganda.
- c. Hasil, yaitu uraian yang berisi jawaban atas pertanyaan rumusan masalah.
- d. Kesimpulan, yaitu penulis memberikan uraian logis terkait seluruh isi penelitian secara singkat.

3. Operasionalisasi Variabel

a. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel Independen yang akan diteliti, yaitu:

1) Koneksi Politik (X_1)

Dalam penelitian ini untuk menentukan dalam perusahaan tersebut memiliki adanya koneksi politik di lihat dari 3 kategori:

- a) Perusahaan merupakan BUMN atau BUMD yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,
- b) Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan politisi yang berafiliasi dengan partai politik,
- c) Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan pejabat pemerintah dalam periode ini maupun periode sebelumnya. [9]

Dalam menentukan perusahaan mempunyai koneksi politik digunakan variabel *dummy*. dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang memenuhi indikator dan kriteria di atas dan 0 jika tidak memenuhi indikator dan kriteria di atas. [9]

Menurut Agung Budi Santoso (2017) melalui artikelnya yang berjudul "Mengenal *Dummy* dalam Regresi" Variabel *Dummy* dapat dimasukkan kedalam regresi logistik. Pemberian nilai 0 dan 1 juga memiliki tehnik tersendiri. Agar mudah dalam menginterpretasikan hasil output regresi, sebaiknya nilai 1 diberikan kepada responden yang diharapkan memiliki pengaruh terhadap nilai Y. [16]

Misalnya contoh Koneksi Politik diatas, Peneliti memiliki hipotesis bahwa Koneksi Politik memiliki pengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*. Sehingga diberikan nilai 1 terhadap Perusahaan yang memiliki Koneksi Politik. Karena nanti hasil koefisien pada variabel ini merupakan pembeda antara Perusahaan yang Memiliki Koneksi Politik dan Perusahaan yang tidak memiliki Koneksi Politik. Jika nilai yang diberikan terbalik, sebenarnya tidak ada yang salah, namun besar kemungkinan nilai koefisien yang keluar nantinya bernilai negatif.

2) *Leverage* (X_2)

Leverage diukur dengan proksi Rasio Utang terhadap Aktiva atau *Debt to Equity Ratio* (DER). [15] Dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Keterangan :

DER : Pengukuran *Leverage*

Total Utang : Jumlah Utang yang dikeluarkan perusahaan selama 1 periode

Total Ekuitas : Jumlah Ekuitas perusahaan selama 1 periode

b. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Aggressiveness* (Y). Pengukuran *Tax Aggressiveness* menggunakan *CETR* (*Cash Effective Tax Rate*) yaitu dengan membagi kas yang telah dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak.

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre-tax income}}$$

Keterangan:

CETR : Pengukuran tarif pajak efektif berdasarkan jumlah yang dibayarkan pada tahun berjalan

Cash tax paid : Jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun berjalan (Beban Pajak)

Pre-tax income : Laba sebelum Pajak

Tax Aggressiveness dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio. Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *Cash Effective Tax Rate* (*CETR*) kurang dari 25%, dan apabila *Cash Effective Tax Rate* (*CETR*) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak. [8]

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Jenis data yang digunakan berupa angka-angka dari Laporan Keuangan Tahunan dan *Annual Report* Perusahaan Manufaktur.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tidak diperoleh melalui alat atau instrumen penelitian, melainkan diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau dari pusat data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data yang telah ada pada Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Makassar, data tersebut berupa Data Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan yang mempublikasikan *annual report* pada situs resmi perusahaan periode 2016-2018.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai Perhitungan *CETR* dan *DER* berupa jumlah beban pajak perusahaan, jumlah laba sebelum pajak perusahaan, Total Utang, dan Total Aset Perusahaan yang terdapat di Laporan Keuangan Tahunan. Serta data mengenai susunan profil atau informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan.

5. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Prosedur pengambilan data/sampel yang digunakan peneliti adalah dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi merupakan kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari kelompok penelitian.

Kriteria Inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018,
- b. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama tahun 2016-2018,

- c. Perusahaan sampel yang memiliki anak perusahaan di luar negeri,
- d. Perusahaan yang menggunakan satuan mata uang Rupiah dalam laporan keuangannya,
- e. Perusahaan memiliki semua data yang diperlukan.

Sedangkan Kriteria Eksklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian,
- b. Perusahaan sampel tidak memiliki anak perusahaan di luar negeri,
- c. Perusahaan yang menggunakan satuan mata uang Asing dalam laporan keuangannya,
- d. Perusahaan sampel yang tidak memiliki kelengkapan data.

6. Teknik Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi).

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat grafik histogram dan *Normal Probability Plot*. Selain itu, uji normalitas juga dilakukan dengan *Kolmogorovv Smirnov Test*. Dasar pengambilan keputusannya jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari model regresi berdistribusi normal.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji *Glejser*.

Uji *Glejser* menyusul untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen [3].

- a) Jika nilai sig > 0,05 maka tidak mengandung heteroskedastisitas.
 - b) Jika nilai sig < 0,05 maka mengandung heterokedastisitas.
- 3) Uji Multikolenearitas

Pengujian multikolenearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model yang digunakan. Korelasi antara variabel independen dapat dideteksi dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF) dengan kriteria [3]:

- a) Jika angka tolerance diatas 0,1 dan VIF < 10 dikatakan tidak terdapat gejala multikolenearitas.
 - b) Jika angka tolerance diatas 0,1 dan VIF < 10 dikatakan terdapat gejala multikolenearitas.
- 4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada penelitian ini untuk menguji adaktidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).

a. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda untuk menganalisis pengaruh koneksi politik, harga transfer, *Leveragedan* pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Model persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Penghindaran pajak

a = Konstanta (harga Y bila X=0)

b1 & b2 = Koefisien regresi

X1 = Variabel Koneksi Politik

X2 = Variabel *Leverage*

e = *standard error*

2) Uji t (T-Test)

Uji t digunakan untuk melihat dan menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan secara individual dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Dapat dilakukan uji t apabila nilai signifikansi t pada masing-masing variable yang ada pada output hasil regresi menggunakan SPSS memiliki tingkat significant level 0.05 ($\alpha= 5\%$). [17]

3) Uji Koefisien Determinasi (**R²**)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Profil Perusahaan

a. Sejarah

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Desember 1912
Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda
- 2) 1914 – 1918
Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I
- 3) 1925 – 1942

Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya

- 4) Awal 1939
Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup
- 5) 1942 – 1952
Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II
- 6) 1956
Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif
- 7) 1956 – 1977
Perdagangan di Bursa Efek vakum
- 8) 10 Agustus 1977
Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama
- 9) 1977 – 1987
Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrument Pasar Modal
- 10) 1987
Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia
- 11) 1988 – 1990
Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat
- 12) 2 Juni 1988

- Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer
- 13) Desember 1988
Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal
 - 14) 16 Juni 1989
Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya
 - 15) 13 Juli 1992
Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ
 - 16) 21 Desember 1993
Pendirian PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
 - 17) 22 Mei 1995
Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems)
 - 18) 10 November 1995
Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996
 - 19) 1995
Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya
 - 20) 6 Agustus 1996
Pendirian Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
 - 21) 23 Desember 1997
Pendirian Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI)
 - 22) 21 Juli 2000

Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia

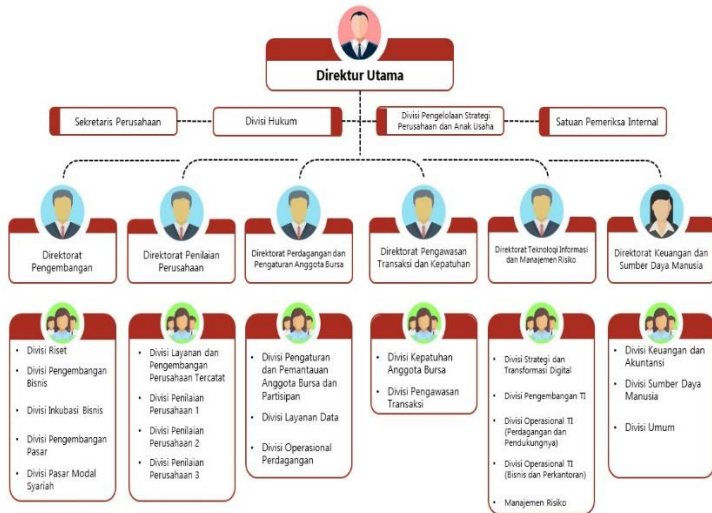
- 23) 28 Maret 2002
BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading)
- 24) 09 September 2002
Penyelesaian Transaksi T+4 menjadi T+3
- 25) 06 Oktober 2004
Perilisan Stock Option
- 26) 30 November 2007
Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)
- 27) 08 Oktober 2008
Pemberlakuan Suspensi Perdagangan
- 28) 10 Agustus 2009
Pendirian Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)
- 29) 02 Maret 2009
Peluncuran Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek Indonesia: JATS-NextG
- 30) Agustus 2011
Pendirian PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)
- 31) Januari 2012
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
- 32) Desember 2012
Pembentukan Securities Investor Protection Fund (SIPF)

b. *Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia*

Visi dari Bursa Efek Indonesia adalah Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia dan Misi dari Bursa Efek Indonesia adalah Menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan Anggota Bursadan Partisipan,

penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan good governance. [18]

c. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia



Gambar 4.1. Struktur Organisasi

d. *Jajaran Direksi*

a) Inarno Djajadi (Direktur Utama)

Ditetapkan sebagai Direktur Utama BEI melalui RUPS pada 29 Juni 2018. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 1962. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1981.

Menimba karir di bidang pasar modal sejak tahun 1991, setelah sebelumnya menjabat sebagai *Treasury Officer* di PT Aspac Uppindo Sekuritas (1989-1991). Setelah itu menjabat sebagai Direktur PT Aspac Uppindo Sekuritas (1991-1997), Direktur PT Mitra Duta Sekuritas (1997-1999), Direktur PT Widari Sekuritas (1999-1999).

Direktur Utama PT Madani Sekuritas (2000-2003). Direktur Utama, kemudian komisaris dan Komisaris Utama PT KPEI (2003-2016), Komisaris Utama PT Maybank Kim Eng Securities (2013-2014). Komisaris Utama PT CIMB Niaga Securities (2014-2017) Jabatan terakhir sebagai Komisaris BEI (2017-2018).

Memiliki pengalaman organisasi sepanjang karirnya di pasar modal yaitu Anggota Ikatan Pialang Efek Indonesia (IPEI) (1992-1994), hingga sampai saat ini sebagai Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jaya (sejak 1998) dan sebagai Dewan Pengawas Profesi Pasar Modal Indonesia (sejak 2017). [18]

b) I Gede Nyoman Yetna (Direktur Penilaian Perusahaan)

Ditetapkan sebagai Direktur Penilaian Perusahaan BEI melalui RUPS pada 29 Juni 2018. Lahir di Bali pada tanggal 4 Mei 1971. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan dari Universitas Udayana Denpasar Bali pada tahun 1996, memperoleh gelar Magister Akuntansi dan Sistem Informasi dari Universitas Indonesia (UI) di tahun 2003 dan saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Strategic Management di UI. I Gede Nyoman Yetna juga memiliki sertifikasi *Chartered Accountant (CA)* dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Memulai karirnya di BEI sebagai pemeriksa pada Satuan Pemeriksa Keuangan (1997-2000), kemudian menjadi Kepala Unit Satuan Pemeriksa Internal (2000-2003), Kepala Unit di Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil (2003-2009), Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil (2009-2014), dan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I (2014-2018). [18]

c) Laksono. W. Widodo (Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota)

Ditetapkan sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa melalui RUPS pada 29 Juni 2018. Lahir di Bandung pada tanggal 29 Agustus 1965. Menyandang Gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan meraih

gelar *Master of Business Administration (MBA)* dari *University of Hawaii at Manoa, Honolulu* di tahun 1992. Memulai karirnya di pasar modal sebagai *Investment Analyst* - PT Baring Securities Indonesia (1993-1995), *Senior Investment Analyst* - PT ING Baring Securities Indonesia (1995-1999), hingga menjadi Direktur - *Head of Equity Research* PT ING Securities Indonesia (1999-2004), Direktur - *Head of Equity Research* PT Macquarie Securities Indonesia (2004-2006), Direktur - *Head of Equities* PT Mandiri Sekuritas (2006-2008), Direktur - PT Ancora Investindo International (2008-2009), menjabat sebagai Staf Ahli untuk Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Anggota Komite Investasi BKPM (2009-2010), kemudian menjadi Direktur Utama - PT RBS Asia Securities Indonesia (2010-2011) dan terakhir menjabat sebagai *Managing Director - Capital Markets* di PT Mandiri Sekuritas (2011-2018). [18]

d) Kristian S. Manullang (Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan)

Ditetapkan sebagai Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI melalui RUPS pada 29 Juni 2018. Lahir di Jakarta pada 26 Juli 1965. Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.

Pernah menduduki beberapa jabatan di BEI di antaranya sebagai Kepala Divisi Kepatuhan Anggota Bursa (2000-2012), Kepala Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa (2012-2015) dan Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 (2015-2017).

Selain itu, beliau juga pernah menjadi Pengurus Perhimpunan Pendidikan Pasar Modal Indonesia (P3MI) di tahun 2015 dan menjabat sebagai Komisaris PT Indonesia Capital Market Electronic Library (ICAMEL) (2015-2018). [18]

e) Fithri Hadi (Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko)

Ditetapkan sebagai Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko BEI melalui RUPS pada 29 Juni 2018. Menyandang gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun

1994 dan meraih gelar *Master of Business Administration* (MBA) dari IPMI-Business School di tahun 2007.

Mengawali karir di BEI sebagai *Head of Information Technology Development and Outsourcing*, kemudian pindah ke berbagai Perusahaan Sekuritas diantaranya PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia - *Wealth Management Service*. Beliau sebelumnya pernah menjadi Direktur Utama PT Indonesia Capital Market Data, Direktur Operasional dan Sarana Sistem Informasi Otoritas Jasa Keuangan. Jabatan terakhir adalah sebagai Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan. [18]

f) Hasan Fawzi (Direktur Pengembangan)

Ditetapkan sebagai Direktur Pengembangan BEI melalui RUPS pada 29 Juni 2018. Lahir di Purwakarta pada tanggal 27 April 1970. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1993 dan memperoleh gelar *Master of Business Administration* (MBA) dari Universitas LIAE de Grenoble, Universite Pierre Mendes, France, dan gelar Magister Manajemen (MM) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 2008.

Memulai karir di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem (1993-1997), kemudian bergabung dengan KPEI dengan posisi terakhir sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi (1997-2008). Menjadi Direktur PHEI (2008-2012) dan Direktur Utama KPEI selama dua periode (2012-2015 dan 2015-2018). [18]

g) Risa E. Rustam (Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia)

Ditetapkan sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia di BEI melalui RUPS pada tanggal 29 Juni 2018. Memulai karir di pasar modal tahun 1989 di HSBC-Custodial Services sebagai *Staff Officer*. Bergabung dengan PT Baring Securities Indonesia tahun 1991 sebagai *Settlements Manager*; menjabat sebagai Direktur PT ING Securities Indonesia sejak tahun 1999,

kemudian sebagai Direktur/COO di PT Macquarie Sekuritas mulai tahun 2004 sampai tahun 2016. Aktif di berbagai Komite Kerja maupun Satuan Tugas di OJK, BEI, KPEI & KSEI sejak tahun 1998 sampai tahun 2016. Meraih Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. [18]

2. Pengolahan Data

a. Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Jumlah Populasi dalam Penelitian ini adalah sebanyak 141 Perusahaan dalam Setiap Tahunnya, yang dimana datanya diperoleh dari Situs Resmi Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang masuk atau sesuai kriteria sebanyak 14 perusahaan. Sampel tersebut digunakan untuk melakukan analisis data dan hipotesis.

Distribusi kriteria sampel dapat dilihat dibawah ini [7]:

Tabel 4.1 Kriteria Sampel Pada Penelitian

Kriteria Sampel Pada Penelitian	2016	2017	2018
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018	141	141	141
Perusahaan sampel yang mengalami kerugian	(53)	(53)	(53)
Perusahaan sampel yang tidak memiliki anak perusahaan di luar negeri	(66)	(66)	(66)
Perusahaan sampel yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangannya	(5)	(5)	(5)
Perusahaan sampel yang tidak memiliki kelengkapan data	(3)	(3)	(3)
Jumlah sampel Per tahun	14	14	14
Total Jumlah Sampel	42		

Sumber : www.idx.co.id

Penjelasan mengenai kriteria sampel penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018, karena sesuai dengan judul penelitian yang dimana objek penelitiannya adalah Perusahaan Manufaktur,
- 2) Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama tahun 2016-2018, karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak diwajibkan membayar pajak sehingga tidak relevan dengan penelitian ini. Selain itu terdapat perhitungan atau rasio dimana diperlukan jumlah laba dari perusahaan,
- 3) Perusahaan yang menggunakan satuan mata uang Rupiah dalam laporan keuangannya, karena Laporan keuangan yang menggunakan mata uang selain rupiah dikeluarkan karena dalam perhitungan penjualan yang dilakukan merupakan akumulasi transaksi yang terjadi sepanjang tahun, sehingga nilai penjualan yang dikonversi dengan menggunakan kurs pada satu tanggal cenderung memberikan hasil yang kurang dibandingkan dengan nilai penjualan perusahaan lain yang tercatat dalam Rupiah.
- 4) Perusahaan memiliki semua data yang diperlukan untuk variabel-variabel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Analisis Data

a. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilairata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, dan *sum* .

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap 42 data observasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2018 menunjukkan:

Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Koneksi Politik	42	0	1	18	.43	.501
Leverage	42	.177598	2.460483	33.529 285	.79831 631	.5423452 58
Tax Aggressiveness	42	-.071571	.536057	7.5957 08	.18085 019	.1085463 83
Valid N (listwise)	42					

Sumber : Data Primer yang diolah (Output SPSS Versi 20) 2019

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

- a. *Tax Aggressiveness* (Y) memiliki nilai minimum sebesar -0,071571 dan nilai maksimum sebesar 0,536057. Nilai rata-rata *Tax Aggressiveness* sebesar 0,18085019, sedangkan standar deviasi sebesar 0,108546383 menggambarkan bahwa penyebaran data dari variabel *Tax Aggressiveness* adalah sebesar 0,108546383 dari 42 data.
- b. Koneksi Politik (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimumnya sebesar 1. Nilai rata-rata Koneksi Politik adalah sebesar 0.43, sedangkan standar deviasi sebesar 0.501 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel Koneksi Politik adalah sebesar 0.501 dari 42 data.
- c. *Leverage* (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0,177598 dan nilai maksimumnya sebesar 2,460483. Nilai rata-rata *Leverage* adalah sebesar 0,79831631, sedangkan standar deviasi sebesar 0,542345258 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel *Leverage* adalah sebesar 0,542345258 dari 42 data.

b. Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 4.3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	.10255005
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.120
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.779
Asymp. Sig. (2-tailed)		.578

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer yang diolah (Output SPSS Versi 20) 2019

Berdasarkan hasil output spss diatas, menunjukkan bahwa data nilai sig. 0.578 ($0.0578 > 0.05$). Dengan demikian kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk penelitian lebih lanjut.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan residual dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan lain. Dengan tidak adanya heteroskedastisitas di suatu model regresi, atau biasa disebut dengan homoskedastisitas. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikannya.

Dengan tidak adanya heteroskedastisitas di suatu model regresi, atau biasa disebut dengan homoskedastisitas. Dasar untuk menguji heteroskedastisitas adalah dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikannya $> 0,05$. Sebaliknya, jika nilai signifikannya $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4. Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.025	.022		1.170	.249
Koneksi Politik	-.001	.021	-.006	-.043	.966
Leverage	.057	.020	.425	2.915	.006

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data Primer yang diolah (Output SPSS Versi 20) 2019

Berdasarkan hasil heteroskedastisitas setelah di transformasi dihasilkan nilai signifikan beberapa variabel, namun variabel *Leverage* nilai signifikannya $< 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Namun menurut Tebacknick dan Fidell (2007) dalam buku yang berjudul "*Úsing Multivariate Statistic*" menganggap bahwa uji heteroskedastisitas tidak menunjukkan bahwa hasilnya tidak valid, akan tetapi menunjukkan bahwa hasilnya lemah. [19]

3) Uji Multikolinieritas

Pengujian asumsi klasik multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi atau hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolonieritas hanya dapat dilakukan jika dipenelitian terdapat lebih dari satu variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada

tidaknya masalah multikolonieritas pada model regresi, yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor).

Hasil Uji Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5. Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.137	.034		4.093	.000		
Koneksi Politik	-.015	.033	-.070	-.459	.649	.989	1.011
Leverage	.063	.030	.313	2.058	.046	.989	1.011

a. Dependent Variable: Tax Aggressiveness

Sumber : Data Primer yang diolah (Output SPSS Versi 20) 2019

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam tabel diatas menunjukkan bahwa variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkolerasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan nilai tolerance berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak ada kolerasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan dapat disimpulkan penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinieritas di antara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

4) Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi merupakan uji yang dilakukan untuk menguji dan mengetahui adanya korelasi pada varians eror antar periode ke periode dari berbagai penelitian. Dalam uji ini, menggunakan Durbin-Watson (DW) yang dihasilkan dari pengujian yang telah dilakukan. Kriterianya adalah dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika $DW > DU$ dan $(4-DW) < DU$ atau bisa dinotasikan sebagai berikut: $(4-DW) > DU < DW$, begitu sebaliknya. [17].

Hasil Uji Autokorelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6. Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.328 ^a	.107	.062	.105146661	1.7604

a. Predictors: (Constant), Leverage, Koneksi Politik

b. Dependent Variable: Tax Aggressiveness

Sumber : Data Primer yang diolah (Output SPSS Versi 20) 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai DW adalah sebesar 1,7604. Nilai DU pada tabel Durbin Watson di dapat 1,6061. Nilai $4 - Du = 2,3939$. Sehingga terjadi kategori $Du < DW < (4 - Du)$ atau $1,6061 < 1,7604 < 2,3939$. Dengan demikian model yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi Autokorelasi.

c. Hasil Uji Hipotesis

1) Uji Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis dan menguji pengaruh koneksi politik dan *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak digunakan analisis regresi linier berganda. Dalam model analisis regresi linier berganda akan diuji secara parsial uji T.

Tabel 4.7. Uji Analisis Regresi Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.137	.034		4.093	.000
	Koneksi Politik	-.015	.033	-.070	-.459	.649
	Leverage	.063	.030	.313	2.058	.046

Sumber : Data Primer yang diolah (Output SPSS Versi 20) 2019

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas perhitungan regresi linear berganda didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 0,192 - 0,010X_1 + 0,208X_2 + e$$

- a) Konstanta = 0,137 Artinya jika tidak ada koneksi politik dan *Leverage* yang mempengaruhi *Tax Aggressiveness*, maka *Tax Aggressiveness* nilainya sebesar 0,137 satuan.
- b) $X_1 = -0,015$ Artinya jika koneksi politik meningkat sebesar satu satuan maka *Tax Aggressiveness* akan meningkat sebesar -0,015 satuan dengan anggapan variable lain tetap.
- c) $X_2 = 0,063$ Artinya jika *Leverage* meningkat sebesar satu satuan maka *Tax Aggressiveness* akan meningkat sebesar 0, 063 satuan dengan anggapan variable lain tetap.

2) Uji T

Uji t digunakan untuk melihat dan menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan secara individual dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Dapat dilakukan uji t apabila nilai signifikasi t pada masing-masing variable yang ada pada output hasil regresi menggunakan SPSS memiliki tingkat significant level 0.05 ($\alpha = 5\%$).

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 didapat hasil sebagai berikut:

a) Hipotesis 1

Berdasarkan hasil olah data dimana nilai t-hitung -0,459 dan probabilitas ($p \geq 0,05$) yaitu 0,649 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 gagal diterima, artinya koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*.

b) Hipotesis 2

Berdasarkan hasil olah data dimana nilai t-hitung 2,058 dan probabilitas ($p \geq 0,05$) yaitu 0,046 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, artinya *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*.

3) Uji Determinasi R^2

Tabel 4.8. Uji Determinasi R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.328 ^a	.107	.062	.105146661

a. Predictors: (Constant), Leverage, Koneksi Politik

Sumber : Data Primer yang diolah (Output SPSS Versi 20) 2019

Besar koneksi politik dan *Leverage* terhadap *Tax Aggressiveness* ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0.107. Artinya 10,7% *Tax Aggressiveness* dipengaruhi oleh koneksi politik dan *Leverage* sisanya 89,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4. Pembahasan

a. Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Aggressiveness*

Perusahaan berkoneksi politik akan memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah. Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak yang rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menetapkan *tax planning* yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Senada dengan Kim dan Zhang (2014) menyatakan dampak positif dari perusahaan memiliki koneksi politik yaitu mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah dalam hal perpajakan seperti menghindari audit pajak.

Perusahaan tidak takut untuk melakukan perencanaan pajak di karenakan pemeriksaan pajak yang rendah. Hubungan politik yang dimiliki perusahaan mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan konsekuensi negative yang ada. [5]

Berdasarkan hasil olah data dimana nilai t-hitung -0,459 dan probabilitas ($p \geq 0,05$) yaitu 0,649 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 gagal diterima, artinya koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang terhubung secara politik cenderung membayar pajak yang lebih rendah dan bahkan pemeriksaan pajaknya juga rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terhubung secara politik selama periode observasi. [20]

Rendahnya pemeriksaan pajak merupakan keuntungan perusahaan yang memiliki koneksi politik yaitu, ketika perusahaan sudah memiliki kepercayaan dari pemerintah maka akan dianggap tidak akan menghindarkan pajak karena dianggap bahwa perusahaan tersebut beresiko rendah terhadap tindakan penghindaran pajak. Hal ini berarti hubungan politik tidak akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, karena tarif pajak perusahaan sudah rendah dengan adanya hubungan makanya perusahaan tidak perlu melakukan penghindaran pajak dengan adanya hubungan tersebut. Penelitian yang sama di sampaikan oleh Swingly & Sukartha (2015) [21], yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

b. Pengaruh *Leverage terhadap Tax Aggressiveness*

Perusahaan yang memiliki utang relatif besar mempunyai *cash effective tax rate* (CETR) rendah karena adanya pembayaran beban bunga akan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan. Perusahaan yang nilai utangnya relative besar akan menyebabkan semakin tingginya pembayaran bunga maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah. [14]

Berdasarkan hasil olah data dimana nilai t-hitung 2,058 dan probabilitas ($p \geq 0,05$) yaitu 0,046 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, artinya *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan modal yang akan mengakibatkan

munculnya bunga, bunga tersebut akan mengurangi beban pajak perusahaan.

Perusahaan memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak bahkan akan cenderung mengarah kepada tindakan penghindaran pajak. Semakin perusahaan menggunakan *Leverage* maka akan semakin besar pula tindakan penghindaran pajak dari adanya beban bunga yang ditimbulkan dari hutang tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Pajriyansyah & Firmansyah, 2016) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. [22]

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pengujian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*. Tidak adanya pengaruh koneksi politik terhadap *Tax Aggressiveness* berarti tidak ada pula pengaruh koneksi pada penghindaran pajak. Perusahaan yang sahamnya sebagian besar dikuasai oleh pemerintah dan memiliki hubungan dengan pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang memiliki resiko rendah.

Kedekatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pemerintah membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan atau keputusan apapun agar tetap mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh. Perusahaan yang patuh seringkali mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah sehingga akan meningkatkan citra perusahaan tersebut. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk selalu mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil olah data dimana nilai t-hitung 3,584 dan probabilitas ($p \geq 0,05$) yaitu 0,001 sehingga dapat disimpulkan *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*. Perusahaan memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak bahkan akan cenderung mengarah kepada tindakan penghindaran pajak. Semakin besar jumlah *Leverage* maka akan semakin besar pula tindakan penghindaran pajak dari adanya beban bunga yang ditimbulkan dari utang tersebut.

2. Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan guna bermanfaat bagi penelitian selanjutnya adalah diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah sampel penelitian dengan jenis industri yang lain sehingga dapat memberi perbedaan terhadap variabel yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan jenis industri yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rika Anggraeni, "Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Aggressiveness," *Artikel*, 2018.
- [2] Masri Dan Martani, "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt," *Program Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 2012.
- [3] Butje, Stella Dan Tjondro, Elisa, "Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance," *Tax & Accounting Review, VOL 4, NO 2, 2014*, 2014.
- [4] Tommy And Maria M Ratna Kurniasih Sari, "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance," *Buletin Studi Ekonomi Universitasudayana*, 2014.
- [5] Francis Chansog And Zhang Kim Liandong, "Corporate Connections And Tax Aggressiveness," *City University Of Hongkong, 2014*, 2014.
- [6] Marfu'ah, L, "Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance," *Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2015.
- [7] Annisa, "Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak," *JOM Fekon, Vol. 4 No.1 (Februari) 2017*, 2017.
- [8] Jensen & Meckling, "The Theory Of The Firm : Manajerial Behaviour, Agency Cost, And Ownership Structure," *Journal Of Financial Economics*, Pp. 3:305-360.
- [9] G., Lestari, W., & Putri, I. G. A. M. A. D. Ayu, "Pengaruh

Corporate Governance, Koneksi Politik Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak," *18, 2028–2054*, 2017.

- [10] Lynch And Rego Frank, "Tax Reporting Aggressiveness And Its Relation To Aggressive Financial Reporting," *The Accounting Review: March 2009, Vol. 84, No. 2, Pp. 467-496*, 2009.
- [11] Hanlon Dyreng And Maydew, "Long Run Corporate Tax Avoidance," *The Accounting Review*, 2009.
- [12] C., And F. Oberholzer-Gee Leuz, "Political Relationships, Global Financing, And Coporate Transparency: Evidence From Indonesia," *Journal Of Financial Economics 81 (2): 411-439.*, 2006.
- [13] Bayu Agung Dan Widagdo, Ari Kuncoro Pronoto, *Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016.
- [14] Mara Faccio, "Politically Connected Firms," *The American Economic Review, 96 (1): 369-386*, 2006.
- [15] Agus Harjito And Martono , *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia, 2010.
- [16] Ngadiman & Christiany Puspitasari, "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *XVIII(3), 408–421*, 2014.
- [17] Agung Budi Santoso, "Mengenal Dummy Dalam Regresi," *Pojok Statistik*, 2017.
- [18] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program. Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- [19] Bursa Efek Indonesia. (2019) IDX. [Online]. <https://www.idx.co.id/>
- [20] Barbara G Tabachnick And Linda S Fidell, *Using Multivariate Statistic*, Seventh Edition Ed., Inc. Lumina Datamatics, Ed.

California, USA: LSC Communications, Inc., 2007.

- [21] Y. A., & Soedirman, U. J. Sudibyo, "Political Connections , State Owned Enterprises And Tax Avoidance : An POLITICAL CONNECTIONS , STATE OWNED ENTERPRISES AND TAX AVOIDANCE : AN EVIDENCE FROM INDONESIA," 2017.
- [22] C., & Sukartha, I. M. Swingly, "Pengaruh Karakteristik Eksekutif , Komite Audit , Ukuran Perusahaan , Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance," 1, 47–62, 2015.
- [23] R., & Firmansyah, A Pajriyansyah, "Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak," 431–459, 2016.
- [24] Abdul Halim, *Dasar-Dasar Akuntansi Biaya, Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE, 2010.

Lampiran 1
Daftar Sampel Perusahaan

Daftar Sampel Perusahaan

KODE PERUSAHAAN	Nama Perusahaan
ASII	Astra Internasional.Tbk
AUTO	Astra Autopart.Tbk
AKPI	Argha Karya Prima Ind.Tbk
EKAD	Eka Dharma International.Tbk
HMPS	HM Sampoerna.Tbk
ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur.Tbk
IMPC	PT. Impack Pratama Industri.Tbk
INDF	Indofood Sukses Makmur.Tbk
JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia.Tbk
MYOR	Mayor Indah.Tbk
RICY	Ricky Putra Global Indo.Tbk
SMGR	Semen Indonesia (Persero).Tbk
SMSM	Selamat Sempurna.Tbk
TSPC	Tempo Scan Pasific.Tbk

Lampiran 2
Data *Tax Aggressiveness*

Data Tax Aggressiveness

Nama Perusahaan	2016	2017	2018
Astra Internasional.Tbk	0,1775	0,2065	0,2178
Astra Autopart.Tbk	0,2550	0,2997	0,2655
Argha Karya Prima Ind.Tbk	0,3102	0,5809	0,2997
Eka Dharma International.Tbk	0,2344	0,2577	0,2702
HM Sampoerna.Tbk	0,2604	0,2560	0,2462
Indofood CBP Sukses Makmur.Tbk	0,2722	0,3195	0,2773
PT. Impack Pratama Industri.Tbk	0,2365	0,1806	0,1016
Indofood Sukses Makmur.Tbk	0,3429	0,3282	0,3337
JAPFA Comfeed Indonesia.Tbk	0,2150	0,3635	0,2708
Mayor Indah.Tbk	0,2476	0,2542	0,2609
Ricky Putra Global Indo.Tbk	0,3993	0,3584	0,3807
Semen Indonesia (Persero).Tbk	0,1081	0,2659	0,2483
Selamat Sempurna.Tbk	0,2370	0,2293	0,2351
Tempo Scan Pasific.Tbk	0,2413	0,2509	0,2574

Lampiran 3
Data Koneksi Politik

Data Koneksi Politik

Nama Perusahaan	2016	2017	2018
Astra Internasional.Tbk	1	1	1
Astra Autopart.Tbk	1	1	1
Argha Karya Prima Ind.Tbk	0	0	0
Eka Dharma International.Tbk	0	0	0
HM Sampoerna.Tbk	0	0	0
Indofood CBP Sukses Makmur.Tbk	1	1	1
PT. Impack Pratama Industri.Tbk	0	0	0
Indofood Sukses Makmur.Tbk	1	1	1
JAPFA Comfeed Indonesia.Tbk	1	1	1
Mayor Indah.Tbk	0	0	0
Ricky Putra Global Indo.Tbk	0	0	0
Semen Indonesia (Persero).Tbk	1	1	1
Selamat Sempurna.Tbk	0	0	0
Tempo Scan Pasific.Tbk	0	0	0

Lampiran 4
Data *Leverage*

Data Leverage

Nama Perusahaan	2016	2017	2018
Astra Internasional.Tbk	0,4657	0,4712	0,4942
Astra Autopart.Tbk	0,2789	0,2712	0,2911
Argha Karya Prima Ind.Tbk	0,5718	0,5896	0,5981
Eka Dharma International.Tbk	0,1573	0,1681	0,1508
HM Sampoerna.Tbk	0,1960	0,1093	0,2413
Indofood CBP Sukses Makmur.Tbk	0,3598	0,3570	0,3393
PT. Impack Pratama Industri.Tbk	0,4615	0,4382	0,4210
Indofood Sukses Makmur.Tbk	0,4653	0,4683	0,4829
JAPFA Comfeed Indonesia.Tbk	0,5131	0,5355	0,5566
Mayor Indah.Tbk	0,5152	0,5069	0,5144
Ricky Putra Global Indo.Tbk	0,6799	0,6869	0,7110
Semen Indonesia (Persero).Tbk	0,3087	0,3783	0,3601
Selamat Sempurna.Tbk	0,2992	0,2518	0,2324
Tempo Scan Pasific.Tbk	0,2962	0,2509	0,3097

Lampiran 5
Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Koneksi Politik	42	0	1	18	.43	.501
Leverage	42	.177598	2.460483	33.529 285	.79831 631	.5423452 58
Tax Aggressiveness	42	-.071571	.536057	7.5957 08	.18085 019	.1085463 83
Valid N (listwise)	42					

Lampiran 6
Uji Normalitas

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.10255005
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.120
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.779
Asymp. Sig. (2-tailed)		.578

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer yang diolah (Output SPSS Versi 20) 2019

Lampiran 7
Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedasitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.025	.022		1.170	.249
	Koneksi Politik	-.001	.021	-.006	-.043	.966
	Leverage	.057	.020	.425	2.915	.006

a. Dependent Variable: RES2

Lampiran 8
Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.137	.034		4.093	.000	
	Koneksi Politik	-.015	.033	-.070	-.459	.649	.989
	Leverage	.063	.030	.313	2.058	.046	1.011

a. Dependent Variable: Tax Aggressiveness

Lampiran 9
Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.328 ^a	.107	.062	.105146661	1.7604

a. Predictors: (Constant), Leverage, Koneksi Politik

b. Dependent Variable: Tax Aggressiveness

Sumber : Data Primer yang diolah (Output SPSS Versi 20) 2019

Lampiran 10
Uji Regresi Linier Berganda

Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.137	.034		4.093	.000
	Koneksi Politik	-.015	.033	-.070	-.459	.649
	Leverage	.063	.030	.313	2.058	.046

Sumber : Data Primer yang diolah (Output SPSS Versi 20) 2019

Lampiran 11
Uji T

Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	.137	.034		4.093	.000
	Koneksi Politik	-.015	.033	-.070	-.459	.649
	Leverage	.063	.030	.313	2.058	.046

Sumber : Data Primer yang diolah (Output SPSS Versi 20) 2019

Lampiran 12
Uji Determinasi R²

Uji Determinasi R²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.328 ^a	.107	.062	.105146661

a. Predictors: (Constant), Leverage, Koneksi Politik